

PERANAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGEMBANGKAN BUDAYA DEMOKRATIS

Desy Nurhidayah¹, Sumarna², Ilham Fajar Suhendar³

Desyn761@gmail.com
Sumarno.unsur@gmail.com
Ilham@unsur.ac.id

Universitas Suryakencana

ABSTRAK

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib yang diajarkan kepada siswa untuk menciptakan warga negara yang sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sendiri berperan sebagai Pendidikan Demokrasi di Indonesia. Siswa tidak hanya mendapatkan materi mengenai pengetahuan kewarganegaraan dan sikap kewarganegaraan saja tetapi juga dengan mata pelajaran PPKn dapat membentuk dan mengembangkan keterampilan kewarganegaraan seperti mengemukakan pendapat dan musyawarah. Adapun peran mata pelajaran PPKn dalam membentuk karakter demokratis siswa dengan mengamalkan nilai-nilai demokrasi, sehingga terbentuklah budaya demokrasi dilingkungan sekolah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat mengembangkan budaya demokratis siswa di SMA Pasundan 1 Cianjur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penulis memperoleh hasil penelitian sebagai berikut : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berperan baik dalam menambah pengetahuan kewarganegaraan siswa dan juga mengembangkan keterampilan kewarganegaraan siswa seperti mengikuti musyawarah dan berani mengemukakan pendapat di kelas.

Kata Kunci: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Budaya Demokratis

PENDAHULUAN

Setiap negara yang ada di dunia pasti menginginkan masyarakat yang terdidik dan cerdas. Hal tersebut dapat dicapai dengan belajar karena pada dasarnya belajar membuat tingkah laku seseorang berubah. Dalam hal ini banyak sekali perubahan tingkah laku seseorang dengan belajar, entah seseorang tersebut dapat merubah pola pikirnya, perbuatannya bahkan tindakan. Belajar aktivitas

kehidupan manusia sehari-hari yang tanpa kita sadari bahwa apa yang kita lakukan tidak lepas dari kegiatan belajar (Aunurrahman, 2011, hlm. 33). Ini membuktikan jika manusia melakukan aktivitas belajar setiap kali ia melakukan sesuatu, entah belajar melalui bangku persekolahan atau lingkungan sekitarnya. Belajar juga merupakan suatu kegiatan yang sangat bermanfaat bagi manusia dengan belajar wawasan kita terhadap sesuatu menjadi semakin luas. Kegiatan belajar sendiri tidak terlepas dengan ruang dan waktu karena dalam hal ini kita mengetahui bahwa belajar dapat didapatkan dengan cara pendidikan formal dan pendidikan informal. Dan banyak dari masyarakat Indonesia yang memilih pendidikan formal sebagai jalan yang ditempuh untuk mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan.

Pendidikan formal bertujuan untuk berupaya mengubah perilaku berupa siswa yang belum terdidik, menjadi siswa yang terdidik, siswa yang belum memiliki pengetahuan tentang sesuatu, menjadi siswa yang memiliki pengetahuan sesuatu. Adapun pada saat ini, Pendidikan di Indonesia mengacu kepada kurikulum 2013, yang dimana peserta didik menjadi objek dalam pembelajaran. Dengan menetapkan kurikulum 2013, dapat mendorong peserta didik aktif pada saat kegiatan belajar berlangsung sehingga peserta didik mendapatkan pengalaman atas apa yang telah dikerjakannya. Pembelajaran dengan kurikulum 2013 ini mengacu kepada pendekatan saintifik yang diharapkan peserta didik dapat tidak hanya mendapatkan dari ranah kognitif saja tetapi juga ranah afektif dan psikomotor. Hal ini senada dengan Hosnan (2014, hlm. 2) yang mengemukakan bahwa “kebijakan pengembangan 2013 ini bertemakan tentang menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui *attitude* atau sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi”. Banyak sekali ilmu yang didapatkan oleh peserta didik selaku orang yang belajar dan salah satunya mata pelajaran yang ikut andil dalam hal ini adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mata pelajaran ini juga merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang diajarkan kepada peserta didik.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang memuat tiga aspek dalam dunia pendidikan, dan dinamakan dengan kompetensi pokok Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Budimansyah (2010, hlm. 21) mengatakan jika pengertian dari tiga kompetensi pokok tersebut adalah: Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*), berkaitan dengan kandungan apa yang harus diketahui oleh seorang warga negara, misalnya pengetahuan tentang kehidupan politik dan pemerintahan yang mencakup dasar-dasar pembentukannya, bagaimana konstitusi mengaturnya, bagaimana hubungan negara dengan negaran dan tentang peran warga negara dalam kehidupan politik dan pemerintahan;

- a. Kecakapan kewarganegaraan (*Civic Skill*) meliputi kecakapan intelektual dan kecakapan-kecakapan lain yang dibutuhkan untuk partisipasi yang tanggung jawab, efektif, dan ilmiah dalam proses dan dalam *civil society*;
- b. Watak kewarganegaraan (*Civic Disposition*) mengisyaratkan pada karakter yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi.

Ketiga kompetensi pokok tersebut saling berkaitan satu sama lain karena merupakan proses dari pembentukan karakter bagi warga negara Indonesia. Ketiga kompetensi pokok tersebut saling berkaitan satu sama lain karena merupakan proses dari pembentukan karakter untuk warga negara Indonesia. Di mulai dengan *civic knowledge*, dimana pengetahuan yang berkaitan dengan kewarganegaraan harus diketahui oleh warga negara, misalnya tentang hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya, jika warga negara sudah mengetahui tentang pengetahuan kewarganegaraan, warga negara dapat mengambil sikapnya mengenai masalah yang dihadapinya dengan keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi, sehingga akan membentuk *civic skills*. Yang terakhir adalah warga negara akan terbiasa melakukan watak kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-harinya atau kehidupan berpolitik.

LANDASAN TEORI

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Seperti kita ketahui bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu disiplin ilmu yang wajib diajarkan di semua jenjang pendidikan. Mata pelajaran PPKn juga merupakan mata pelajaran yang mengajarkan nilai, norma, membentuk warga negara yang baik, pendidikan karakter, demokrasi, berfikir kritis dan yang lainnya. Menurut Dewantara dkk., (2019, hlm. 401) mengemukakan bahwa *the concept or understanding of Civic Education in Indonesia cannot be separated from development of Civics or Citesenzenship in the United State as the country of origin of Civics and Civic Education lessons*. Hal tersebut menunjukkan jika mata pelajaran PPKn ini meliputi seluruh bidang di kehidupan di Indonesia. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga merupakan salah satu bidang kajian yang mengembangkan dalam kecerdasan kehidupan bangsa Indonesia. MenuApalagi zaman sekarang, kita juga harus memperhatikan kemajuan IPTEK dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini selaras dengan Arwiyah & Machfiroh (2014, hlm. 2) menyatakan bahwa :

Tuntutan terhadap sosok Warga Negara Republik Indonesia pada era saat ini adalah harus memiliki kemampuan untuk dapat hidup berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi perkembangan lengkap dan perubahan masa depannya, untuk itu sangat memerlukan pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (iptek) yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai budaya bangsa.

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak hanya berfokus kepada materi yang diajarkan kepada peserta didik pada saat aktivitas belajar mengajar tetapi juga mengandung tentang penguatan Pendidikan Karakter peserta didik. “Inti dari karakter adalah kebajikan (*goodness*) dalam arti berpikir yang baik (*thinking good*), berperasaan yang baik (*feeling good*), dan berperilaku baik (*behaving good*)” (Budimansyah, 2010, hlm. 10). Meskipun tidak hanya mata pelajaran PPKn yang memuat mengenai Pendidikan Karakter tetapi juga bersamaan dengan mata pelajaran yang lain. Di Indonesia sendiri, usaha dalam membangun karakter sudah ada sejak dahulu atau lebih tepatnya pada awal kemerdekaan melalui mata pelajaran *Civics* atau Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, membangun karakter disini juga dapat dikatakan bagaimana peserta didik dalam berdemokrasi pada saat proses pembelajaran di kelas. Seperti menurut Baidi (2016, hlm. 46) “Pendidikan Kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran yang secara khusus berperan untuk membentuk warga negara yang baik, demokratis, bertanggung jawab, dan membangun kesadaran keberagaman bangsa”. Hal ini penting, mengingat peserta didik merupakan generasi muda sehingga dapat bersikap pada masa mendatang.

Menurut Darmadi (2014, hlm. 2) dengan mempelajari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam pendidikan formal berupaya dalam menanamkan sikap kepada warga negara khususnya pada generasi muda agar “berpartisipasi aktif membangun masyarakat Indonesia yang demokratis dengan berlandaskan nilai dan budaya demokrasi yang bersumber pada Pancasila”. Dalam hal inilah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan didasarkan kepada pembentuk karakter peserta didik sebagai hasil dari proses nilai dan moral yang terkandung dalam pribadi bangsa Indonesia. Hal ini membuktikan jika Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak hanya memperhatikan dari segi keilmuan saja tetapi karakter dan keterampilan siswa juga dapat diasah dengan mata pelajaran ini. Hal ini dibuktikan dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki tiga kompetensi kewarganegaraan yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*), Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skill*), dan watak kewarganegaraan (*Civic Disposition*).

Budaya Demokrasi

Kita semua pasti tidak asing dengan istilah demokrasi, pasalnya demokrasi ini merupakan salah satu sistem pemerintah atau politik yang sering sekali digunakan oleh berbagai negara di belahan dunia termasuk di Indonesia. Secara etimologi demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* atau *cratein* berarti pemerintahan atau kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Juliardi (2014, hlm. 82) mengatakan bahwa konsep pemerintahan rakyat mengandung tiga pengertian :

- a. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) yaitu yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah (dapat pengakuan dan dukungan rakyat dan tidak sah;

- b. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) yaitu dimana kekuasaan yang dijalankan atas nama dan dalam pengawasan rakyat;
- c. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) yaitu dimana kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Konsep dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ini dicetuskan oleh Abraham Lincoln. Dapat dikatakan jika, pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara demokrasi berada ditangan rakyat. Hal ini selaras dengan pendapat Hook dalam Juliardi (2014, hlm. 82) yang mengemukakan “demokrasi dapat diartikan dengan bentuk pemerintahan di mana keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa”. Dengan demikian, negara yang menganut demokrasi ini negara yang diselenggarakan atas kehendak rakyat walaupun nantinya dijalankan oleh wakil-wakil rakyat hasil dari pemilihan umum.

Demokrasi di Indonesia sendiri, sudah dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat adat Bugis dan Batak. Hal ini dipertegas dengan pendapat Mattulada (dalam Mahfud, 2003, hlm. 31) yang menyatakan secara “perorangan warga kaum adalah merdeka dan wajib menghormati dan melindungi kemerdekaan sesama warganya, tidak sampai disitu tiap-tiap warga kaum dianggap mempunyai hak dan kedudukan yang sama, sedangkan kepala kaum tidak mempunyai kelebihan hak atas warganya”. Dengan demikian, di demokrasi di Indonesia sudah mengenal sistem demokrasi sejak dahulu kala. Dalam sistem pemerintahan dan politik di Indonesia, demokrasi ini disebut dengan demokrasi Pancasila. Dapat disebut dengan “demokrasi Pancasila karena tatanan kehidupan negara dan masyarakat berdasarkan kedaulatan rakyat yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila” (Darmadi, 2014, hlm. 240). Tidak hanya itu, demokrasi Pancasila juga mengutamakan musyawarah mufakat, yang dimana setiap keputusan diambil dari keputusan bersama.

Indonesia mengalami beberapa perubahan dalam menganut sistem demokrasi yakni demokrasi konstitusional, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Namun demokrasi sebelumnya mengalami kegagalan apalagi pada saat demokrasi terpimpin. Budiardjo (2013, hlm. 134) mengemukakan “jika bangsa Indonesia pada saat itu, bersepakat untuk sekali lagi melakukan demokratisasi, yakni proses pendemokrasian sistem politik di Indonesia sehingga kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakkan, dan pengawasan terhadap eksekutif dapat dilakukan oleh lembaga wakil rakyat”. Barulah setelah masa reformasi, keadaan demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik. Adapun demokratisasi diperlukan sebagai langkah untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi dan dalam melakukan demokratisasi ini diperlukan secara bertahap sehingga warga negara dapat terbiasa dan mengamalkannya di kehidupan sehari-harinya. Dan nilai-nilai demokrasi yang dimaksud menurut Zamroni dalam Winarno (2007, hlm. 98) adalah :

- a. Toleransi;
- b. Kebebasan mengemukakan pendapat;

- c. Menghormati perbedaan pendapat;
- d. Memahami keanekaragaman dalam masyarakat;
- e. Terbuka dan komunikasi;
- f. Percaya diri;
- g. Tidak menggantungkan orang lain;
- h. Saling menghargai;
- i. Mampu mengekang diri;
- j. Kebersamaan; dan
- k. Keseimbangan.

Nilai-nilai demokrasi ini perlu diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, mengingat jika bangsa Indonesia ini negara multikulturalisme, dimana banyaknya perbedaan, entah itu suku, ras, bahasa, dan lain-lain. Dengan begitu, Indonesia dapat melaksanakan budaya demokrasi dengan baik.

Hubungan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Dengan Budaya Demokratis

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran berperan sebagai upaya menyadarkan peserta didik mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, mata pelajaran PPKn sendiri berperan dalam pendidikan demokrasi pada pendidikan formal yang nantinya mereka akan mengenai sistem politik dan pemerintahan demokrasi. Darmadi (2014, hlm. 4) menyatakan bahwa “kompetensi yang diharapkan dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan antara lain agar peserta didik mampu menjadi warga negara yang memiliki pandangan dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM”. Dengan begitu peserta didik akan terbiasa dengan sikap dan perilaku yang demokratis.

Pendidikan demokrasi ini biasanya dijumpai pada bangku persekolahan atau pendidikan formal. Juliardi (2014, hlm. 101) menyatakan jika pendidikan demokrasi dapat dilakukan dengan tiga cara :

- a. Pendidikan demokrasi secara formal: pendidikan yang lewat tatap muka, diskusi timbal balik, presentasi serta studi kasus;
- b. Pendidikan demokrasi secara informal: pendidikan yang lewat tahap pergaulan di rumah maupun di masyarakat, sebagai bentuk aplikasi nilai berdemokrasi sebagai hasil interaksi terhadap lingkungan sekitarnya dan langsung dapat dirasakannya;
- c. Pendidikan demokrasi secara nonformal: pendidikan yang melewati lingkungan masyarakat secara lebih makro karena pendidika di luar sekolah memiliki parameter yang signifikan terhadap pembentukan jiwa seseorang, seperti kelompok masyarakat, lembaga swadaya, partai politik, pers, dan lain-lain.

Dengan demikian, pemerintah menyadari bahwa pentingnya mata pelajaran ini dalam menerapkan demokrasi di kehidupan sehari-harinya. Pendapat

Febrianti dan Darmawan, diperkuat dengan pendapat dari Juliardi yang mengatakan bahwa pada dasarnya demokrasi tidak diwariskan dengan sendirinya (*democracy is not inherited*) akan tetapi ditangkap dan dicerna melalui proses belajar (*but it is learned*). Hal tersebut senada dengan pendapat Sanusi & Darmawan (2016, hlm 26) bahwa Pendidikan demokrasi melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sekaligus disebut sebagai salah satu wahana pendidikan demokrasi di Indonesia”. Memberikan pendidikan demokrasi kepada generasi muda khususnya peserta didik selaku warga negara dapat mewujudkan masyarakat yang demokratis, harus ditanamkan nilai-nilai demokratis sehingga dapat memahami, menghayati, mengamalkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui angket, wawancara dan studi dokumentasi. Populasi penelitian adalah siswa kelas X dan XI SMA Pasundan 1 Cianjur yang berjumlah 183 siswa. Adapun sampel dalam penelitian ini dilakukan secara acak. Pada penelitian ini angket yang disebar sebanyak 46 siswa sebagai responden penelitian yang terdiri dari kelas X IPA 1 dan kelas XI IPA 2 di SMA Pasundan 1 Cianjur. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai guru PPKn SMA Pasundan 1 Cianjur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini akan membahas peran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengembangkan budaya demokratis. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran wajib diajarkan dari jenjang sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Hal tersebut dikarenakan agar terciptanya generasi muda agar menjadi warga negara yang baik. Selain itu, mata pelajaran ini juga memiliki peran yang penting bagi siswa sebagai sarana Pendidikan Demokrasi di sekolah. Dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, siswa mendapatkan tidak hanya mendapatkan pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) saja, tetapi keterampilan kewarganegaraan (*Civic Skill*) dan watak kewarganegaraan (*Civic Disposition*) pun tak luput dari pembahasan mata pelajaran tersebut. Dengan ketiga komponen tersebut, diharapkan siswa dapat menjadi generasi yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Pengetahuan kewarganegaraan ini sangat penting bagi siswa karena berkaitan dengan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban warga negara atau pun hak asasi manusia. Dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pengetahuan kewarganegaraan dapat membekali siswa agar menjadi warga negara yang demokratis dengan menguasai berbagai pengetahuan kenegaraan di Indonesia. Hal tersebut agar siswa menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*) yaitu warga negara yang berperan aktif dan

bertanggung jawab bagi pemerintah maupun untuk dirinya sendiri. Dalam arti lain, pengetahuan kewarganegaraan ini membahas mengenai apa-apa saja yang harus diketahui oleh warga negara. Oleh karena itu, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini harus dipelajari mulai dari pendidikan dini dan materi yang diajarkan pun disesuaikan dengan tingkatan pendidikan siswa.

Setelah siswa dibekali oleh pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*), siswa juga akan mendapatkan keterampilan kewarganegaraan atau biasa disebut dengan *Civic Skill*. Tentu saja, ini juga menjadi salah satu bagian penting diajarkannya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah. Siswa tidak hanya menguasai pengetahuan kewarganegaraan tetapi harus dibarengi dengan keterampilan kewarganegaraan. Pada kegiatan belajar, keterampilan kewarganegaraan ini dapat dilakukan dengan mengemukakan pendapat dan juga musyawarah. Dengan melakukan kegiatan musyawarah di kelas, siswa akan dimintai pendapatnya mengenai suatu hal yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Dengan begitu, siswa akan berpikir dengan kritis serta pada saat ia menyampaikan pendapatnya disertai dengan alasan yang logis sehingga apa yang ia sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh teman-temannya.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sendiri berperan sebagai Pendidikan Demokrasi di sekolah. Dalam mata pelajaran PPKn sendiri memuat materi mengenai Pendidikan Demokrasi yang khusus untuk diajarkan kepada siswa di sekolah. Pendidikan demokrasi di sekolah dapat dilihat pada saat kegiatan belajar siswa yaitu melakukan musyawarah dan juga siswa mengemukakan pendapat di depan kelas. Hal tersebut dimaksudkan agar siswa lebih aktif pada saat pembelajaran berlangsung, apalagi pada kurikulum 2013 ini siswa dituntut bukan hanya menguasai ranah kognitifnya saja tetapi ranah afektif dan psikomotoriknya pun harus dikuasai oleh siswa. Dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, siswa dapat mempelajari dan juga menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kegiatan belajar maupun kehidupannya sehari-hari.

Dalam suatu negara demokrasi, mengemukakan pendapat bukanlah hal yang baru untuk didengar dan juga merupakan salah satu ciri demokrasi. Setiap warga negara tentu saja mempunyai hak dalam mengemukakan apa yang ia pikirkan secara bebas tanpa ada tekanan dari pihak mana pun. Siswa diberikan kebebasan dalam mengeluarkan pendapatnya mengenai suatu materi yang diberikan oleh gurunya. Dalam hal ini, dipertegas dalam Pasal 28 Undang-undang 1945. Meskipun peserta didik diberikan kebebasan dalam berpendapat tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai, norma-norma kesusilaan, dan yang lainnya. kemudian, kemampuan berbicara di depan kelas merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik. "Pasalnya mengemukakan pendapat adalah salah satu kegiatan yang harus ada dalam aktivitas pembelajaran siswa, kegiatan siswa mengemukakan pendapat ini tergolong dalam kegiatan lisan atau oral" menurut Dierich (dalam Amin, 2016, hlm. 4). Dan juga menyampaikan pendapat ini, salah satu bentuk kemampuan peserta didik yang tidak hanya dalam ranah afektif tetapi juga ranah kognitif dan psikomotor. Hal ini dimaksudkan agar

peserta didik dapat untuk berani lebih berani dalam mengeluarkan pendapatnya. Rahayu (2012, hlm. 58) menyatakan bahwa:

Untuk dapat mengetahui seberapa keberanian seorang siswa dalam mengungkapkan pendapatnya dalam proses pembelajaran dibutuhkan rangsangan didalam diri seorang siswa agar terajak untuk adapat memberikan sebuah argumen tentang sebuah masalah atau tanggapan tentang materi pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas.

Musyawarah juga merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang sering sekali dijumpai oleh masyarakat di Indonesia. Musyawarah sendiri dapat dilakukan pada jenjang pendidikan, meskipun untuk kegiatan musyawarah ini biasanya dilakukan dari jenjang sekolah menengah pertama (SMP) sampai dengan jenjang perguruan tinggi. Musyawarah sendiri, dapat diartikan sebagai kegiatan bertukar pikiran mengenai suatu hal. Di sekolah, musyawarah ini dimaksudkan agar merangsang siswa agar dapat berpikir secara kritis dan seberapa jauh siswa tersebut memahami suatu kondisi menyangkut materi pembelajaran atau bahkan permasalahan yang sedang dihadapi di kelas. Tentu saja, dalam memutuskan suatu hal harus mencapai mufakat atau kesepakatan bersama. Dengan melakukan kegiatan musyawarah melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, siswa dapat belajar untuk membangun rasa persatuan dengan lebih mementingkan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang penulis lakukan melalui data angket yang penyebarannya pada siswa-siswa kelas X IPA 1 dan XI IPA 2 dan wawancara dilakukan kepada guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Pasundan 1 Cianjur, hasil tersebut diketahui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat mengembangkan budaya demokratis. Dan juga dalam penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mempunyai peran yang penting dalam mengembangkan budaya demokratis. Melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi bagi siswa di sekolah, sehingga dapat melatih dan membentuk sikap yang demokratis bagi siswa-siswa di SMA Pasundan 1 Cianjur. Meskipun dalam pelaksanaannya, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menuturkan bahwa metode diskusi merupakan salah satu cara yang ampuh untuk mengembangkan sikap demokrasi pada dalam diri siswa.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai demokrasi sehingga siswa-siswa yang dapat disebut dengan warga negara memahami dan melaksanakan dari sikap demokratis. Hal tersebut, diperkuat dengan pendapat Syarbaini, dkk (2012, hlm. 80) menyatakan bahwa demokratis ini hidup tumbuh dari dalam diri penyelenggaraan negara maupun warga negara umumnya. Sehingga dengan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, siswa-siswa dilatih untuk dapat mengembangkan sikap demokratisnya dengan mengemukakan pendapat dan musyawarah di kelas. Secara konsep dan teori, siswa-siswi sudah

mengerti tentang budaya demokrasi pada saat pembelajaran seperti mengemukakan pendapat atau jika ada suatu permasalahan di kelas melakukan musyawarah sebagai jalan keluarnya. Meskipun dalam pelaksanaannya, ada beberapa kendala yang harus dilalui oleh siswa seperti belum berani menyampaikan pendapatnya pada saat kegiatan belajar.

KESIMPULAN

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib dan penting untuk diajarkan kepada peserta didik yang berada di seluruh jenjang pendidikan, termasuk juga di SMA Pasundan 1 Cianjur. Hal tersebut karena mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mampu membekali siswa mulai dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga dapat membina serta mampu memberikan kesadaran dan melatih siswa tentang budaya demokratis dengan mengemukakan pendapat dan bermusyawarah pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Adapun Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berperan dengan baik dalam menambah pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan siswa di SMA Pasundan 1 Cianjur. Hal tersebut ditandai dengan aktifnya siswa pada kegiatan pembelajaran, seperti menyampaikan pendapatnya dan tidak bersikap acuh tak acuh pada kegiatan musyawarah serta pada saat memutuskan musyawarah pun didasari oleh persetujuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, D. (2016). Penerapan Metode Curah Gagasan (Brainstorming) Untuk Meningkatkan Kemampuan Mengemukakan Pendapat Siswa. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(2),1-5. <https://doi.org/10.21009/JPS.052.01>
- Arwiyah, Y., & Machfiroh, R. (2014). *Civic Education di Perguruan Tinggi di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Aunurrahman. (2011). *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- Baidi. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan : Berbasis Multikulturalisme Perspektif Psikologi Sosial Islam*. Yogyakarta : Deepublish.
- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Darmadi, H. (2014). *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi* (Edisi Kedu). Bandung: Alfabeta.
- Dewantara, J. A., Suhendar, I. F., Rosyid, R., & Atmaja, T. S. (2019). *Pancasila as Ideology and Characteristics Civic Education in Indonesia*. 1(5), 400–405.
- Hosnan. (2014). *Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21*. Bogor: Ghalian Indonesia.

- Juliardi, B. (2014). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Mahfud, M. (2003). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rahayu, M. (2012). Peranan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Keberanian Mengemukakan Pendapat Siswa. *Fkip Ump*, 3(1), 9–64. <https://doi.org/10.36412/ce.v3i1.908>
- Sanusi, A., & Darmawan, C. (2016). *Implementasi Pendidikan Politik Dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Lintas Budaya Pada Generasi Muda Demi Mewujudkan Budaya Politik Pancasila*. 25(1), 24–40.
- Winarno. (2007). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan* (Edisi Kedua). Jakarta: PT Bumi Aksara.